Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif Filsafat Pendidikan Islam

Subakri

Institut Agama Islam Negeri Jember

cakbakri@gmail.com

Abstract

This article discusses the quality standard of madrasah management perspective of Islamic education philosophy. From the results of the study, it can be concluded that the criteria for measuring success in prioritizing madrasah management on quality, namely: the number of students receiving services is increasing; the level of classroom living is declining, and school productivity is getting better; the relevance of better education; increased stakeholder involvement; teacher and school staff welfare improved, and democratization in the administration of education. The basis for managing quality-based management in the study of Islamic Education philosophy is: doing work with itqan (precise, clear, and directed); reach the goal earnestly; management concept.

Keywords; *Quality Standards, Management, Madrasah, Philosophy Of Islamic Education.*

Abstrak

Artikel ini membahas standar mutu pengelolaan madrasah perspektif filsafat pendidikan islam. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kriteria ukuran keberhasilan pengelolaan madrasah priorita pada mutu, yaitu: jumlah siswa yang mendapat pelayanan semakin meningkat; tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik; relevansi penyelenggaraan pendidikan semakin baik; meningkatnya keterlibatan stakeholders; kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik; dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Landasan melakukan pengelolaan yang berbasis peningkatan mutu dalam kajian filsafat Pendidikan Islam, yaitu: melakukan pekerjaan dengan itqan (tepat, jelas dan terarah); mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh; konsep manajemen.

Kata Kunci; *standar mutu, Pengelolaan, Madrasah, Filsafat Pendidikan Islam*

Pendahuluan

Momentum Reformasi di hampir dua dekade yang lalu membawa dampak diantaranya adalah reformasi di bidang pendidikan. Pola pengelolaan pendidikan yang dulunya sentralistik sekarang berubah menjadi desentralistik. Pengelolaan pendidikan terbagi menjadi standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah.¹ Era globalisasi sekarang ini juga membawa dampak pada dunia pendidikan untuk dikelola secara profesional sehingga berkompetisi menghasilkan *output* yang berkualitas dan dapat bersaing secara luas di kancah internasional.² Pada pola desentralistik mendorong adanya peran lebih dari masing-masing satuan pendidikan. Sehingga pola ini memunculkan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan, yaitu manajemen berbasis sekolah atau manajemen berbasis madrasah (MBS/MBM).

Pada MBS/MBM masing-masing satuan pendidikan mendapat porsi lebih dan keleluasan serta wewenang penuh untuk mengelola berbagai kebutuhan demi tercapainya tujuan pembelajaran peserta didik. Atau dengan kata lain sekolah memiliki otonomi agar tujuan pembelajaran yaitu menghasilkan *output* berkualitas yang mampu bersaing dapat terwujud. Salah satu kriteria keberhasilan MBS/MBM menurut Nurcholis seperti yang dikutip Syaifuddin adalah adanya kualitas layanan yang baik atau layanan bermutu.³ Kriteria keberhasilan MBS/MBM adalah ukuran yang dapat dijadikan dasar penilaian atau penetapan ketercapaian suatu program MBS/MBM. Oleh karenanya menjadi penting memberikan layanan yang bermutu/ kualitas oleh satuan pendidikan untuk mensukseskan program MBS/MBM.

Bahwa kini pendidikan tidak selalu dimaksudkan hanya semata-mata diukur dari prestasi yang dicapai siswa. Maka perlu adanya redefinisi terhadap parameter keberhasilan pendidikan, bahwa melainkan dalam konteks yang lebih luas, pencapaian suatu keberhasilan pendidikan tergantung pada kualitas pendidikan dan pelayanan yang diberikan. Senada dengan hal tersebut, menurut Tampolon lulusan yang berkualitas sesungguhnya hanyalah produk

¹ <http://bnsip-indonesia.org> diakses tanggal 26 Mei 2020.

² Ian G. Evans, *Marketing For School* (London: Cassel, 1995), Vii

³ Mohamad Syaifudin, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 310.

parsial, terdapat berbagai jasa atas layanan pendidikan yang menjadi produk utamanya.⁴

Kualitas/mutu merupakan sebuah istilah yang pemaknaannya sangat subjektif dan kontekstual, sehingga pengertian mengenai kualitas pelayanan pendidikan akan sangat berbeda antara satu orang dengan orang yang lain dan antara satu instansi dengan instansi yang lain. Padahal mutu harus ditetapkan untuk menyebut sebuah institusi dikatakan bermutu. Dalam penyelenggaraannya mutu sesungguhnya merupakan standar mutu pelayanan institusi yang ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria sesuai dengan tujuan institusi tersebut, sedangkan mutu dalam persepsi diukur dari kepuasan pelanggan, meningkatnya minat, harapan serta kepuasan pelanggan. Sesuatu dapat dikatakan bermutu atau berkualitas jika telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau telah sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Dengan demikian, layanan dikatakan bermutu atau kualitas pelayanan (*service quality*) jika telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau telah sesuai dengan kebutuhan pelanggan jasa pendidikan. Artikel fokus Untuk mengetahui dan memahami konsep Manajemen Berbasis Sekolah/ Manajemen Berbasis Madrasah dalam perspektif filsafat Pendidikan Islam serta dampak mutu layanan pada pelanggan sekolah/ madrasah.

Kajian Pustaka

Standar Mutu Sekolah/ Madrasah

Mutu memiliki definisi yang variatif. Bahkan mutu merupakan konsep yang relatif dan dinamis. Definisi relatif mutu menurut Sallis memiliki dua aspek, yaitu: menyesuaikan dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan.⁵ Pada aspek pertama, seringkali disimpulkan sebagai 'sesuai dengan tujuan dan manfaat'. Suatu produk/jasa dikatakan bermutu selama produk/ jasa tersebut secara konsisten sesuai dengan tuntutan pembuatnya atau dengan kata lain memenuhi spesifikasi yang ditetapkan produsen. Mutu yang demikian sering disebut sebagai mutu yang sesungguhnya atau *quality in fact*. Sedangkan pada aspek yang kedua mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan atau melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.⁶ Definisi ini sering disebut dalam istilah *quality in perception*.

⁴ Daulat P. Tampubolon, *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-2* (Cet I; Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2001), 71

⁵ Edward Sallis, *Total Quality Managemen in Education*, (Cet. XVI; Jogjakarta: IrciSod, 2012), 54.

⁶ Edward Sallis, *Total...*, 56.

1. Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai *Quality in Fact*

Secara etimologis, standar memiliki arti ukuran,⁷ dimana dalam kata kerja mengukur berarti menilai mutu dengan cara membandingkan, menguji, mencoba mengira dan sebagainya.⁸ Berdasarkan definisi ini, yang dimaksud dengan standar adalah acuan yang digunakan untuk menilai mutu atau kualitas dari kegiatan yang dilakukan. Dalam konteks madrasah dapat didefinisikan sebagai acuan yang digunakan dalam menilai kualitas sebuah madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang berciri khas Islam di mana dalam kurikulum bidang studi agama Islam sudah diklasifikasikan menjadi beberapa sub mata pelajaran, yaitu: Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan ditambah dengan Bahasa Arab.⁹ Tidak berbeda dengan sekolah umum lainnya, sebagai lembaga formal, madrasah tidak akan lepas dari aturan pemerintah mengenai sistem pendidikan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kualitas madrasah atau sekolah formal pada umumnya, pemerintah telah menyediakan aturan mengenai standar yang harus dipenuhi setiap satuan pendidikan. Standar ini dapat digunakan untuk menjadi acuan setiap madrasah dalam menilai kinerja mereka. Standar tersebut disebut dengan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang terdiri dari: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala, untuk selanjutnya Standar nasional pendidikan tersebut digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.¹⁰

Salah satu standar yang menjadi acuan dalam manajemen atau pengelolaan sebuah madrasah tersebut adalah standar pengelolaan yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau

⁷ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia...*, 560

⁸ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia...*, 617

⁹ Dawam Ainurrafiq dan Ta'arifin Ahmad, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Jakarta: Listafarika Putra, 2008), . 56.

¹⁰ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (pasal 51 ayat 1 dan 2)

nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.¹¹ Untuk satuan pendidikan dasar dan menengah (madrasah/ sekolah) standar pengelolaan pendidikan ini diatur dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007¹². Setiap pengelola satuan pendidikan baik madrasah maupun sekolah umum lainnya, harus mendasarkan kinerja pengelolaan yang dibuat dan dilaksanakan di madrasah/sekolah pada semua kebijakan dalam permendiknas tersebut. Berikut ini merupakan ringkasan landasan hukum standar mutu pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 1. Landasan Hukum Standar Mutu Pengelolaan Pendidikan dasar dan Menengah

UU/PP/Permendiknas	Pasal
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 51 (1)
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	Bab VIII Standar Pengelolaan, Bagian Kesatu, Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Pasal 49 sampai dengan pasal 58. Serta keseluruhan pasal dan ayat yang menyangkut bidang garapan pengelolaan satuan pendidikan
Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.	Seluruh pasal dan ayat

Dari berbagai landasan hukum di atas terdapat satu kebijakan penting yang harus dipahami oleh tiap satuan pendidikan dasar dan menengah yaitu yang tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 (1) yang menetapkan manajemen berbasis sekolah (*school based management*) sebagai prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan semua

¹¹ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Pasal 1 (9)), 2

¹² Menteri Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*

satuan pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 49 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah ini menyatakan: "Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas."

Kegiatan-kegiatan manajemen (pengelolaan) apa saja yang harus dipenuhi untuk dilaksanakan oleh madrasah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan program, antara lain dimulai pada tahapan; perumusan visi sekolah, perumusan misi sekolah, perumusan tujuan sekolah, membuat rencana kerja sekolah, yaitu rencana kerja menengah dan tahunan yang meliputi kegiatan: kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan, rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.
2. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Program, antara lain dimulai pada tahapan; Membuat Pedoman Sekolah/madrasah, yang meliputi: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kalender pendidikan/akademik, Struktur organisasi sekolah/madrasah, Tata tertib sekolah/madrasah, Kode etik sekolah/madrasah, Biaya operasional sekolah/madrasah. Selanjutnya adalah Membuat Struktur Organisasi Sekolah, meliputi kegiatan: Memasukkan unsur staf administrasi dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan administrasi secara optimal. Dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitas mekanisme kerja pengelolaan sekolah. Diputuskan oleh kepala sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah/madrasah. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah
 - a. Pengelolaan Bidang Kesiswaan, yang meliputi kegiatan: Menetapkan kriteria calon pendidik, Melakukan penerimaan peserta didik sekolah/madrasah yang dilakukan, Pengelolaan Bidang Kurikulum dan Pembelajaran.
 - b. Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang meliputi kegiatan: membagi tugas, menetapkan target kinerja,

- meningkatkan kompetensi, memberikan penghargaan, dan mempromosikan, Meningkatkan keunggulan mutu TAS meliputi kegiatan administrasi persuratan, administrasi kesiswaan seperti buku induk, keuangan, kurikulum, inventaris. Meningkatkan mutu pengelolaan data meliputi dokumentasi evaluasi kinerja, dokumentasi program, dokumentasi penjaminan mutu- sistem informasi berbasis TIK. Mengelola pendidikan meliputi mengelola data pendidik, memberikan tugas, menetapkan target kinerja, mendapat pematauan, mendapat pelayanan peningkatan kompetensi, mendapatkan penghargaan/promosi
- c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana, yang meliputi kegiatan: (1) perencanaan kebutuhan, (2) pengadaan, (3) penyimpanan, (4) penginventarisasian, (5) pemeliharaan, (6) penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.¹³
 - d. Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan, yang meliputi kegiatan: perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan.¹⁴
 - e. Pengelolaan Budaya dan Lingkungan Sekolah
 - f. Pengelolaan Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah, yang meliputi kegiatan seperti: Membangun kerja sama antar pendidik, tenaga kependidikan, siswa, antar sekolah dalam provinsi dan tingkat nasional.
3. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi
- a. Program Pengawasan yang menjamin beberapa hal, antara lain seperti: Kepala sekolah benar-benar mendapatkan pelayanan supervisi sebagai realisasi penjaminan mutu dalam mengelola dokumen perencanaan, indikator dan target, pelaksanaan kegiatan, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi serta perbaikan pekerjaan. Pendidik benar-benar Mendapatkan pelayanan supervisi sebagai realisasi penjaminan mutu dalam mengelola dokumen perencanaan, indikator dan target, pelaksanaan kegiatan, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi serta perbaikan pekerjaan. Tenaga administrasi sekolah benar-benar mendapatkan pelayanan supervisi sebagai realisasi penjaminan mutu dalam mengelola dokumen perencanaan, indikator dan target, pelaksanaan kegiatan, pemantauan

¹³ Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, Cet.2, 2008), 26

¹⁴ Rohiat, *Manajemen Sekola..*, 27

- pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi serta perbaikan pekerjaan.
- b. Evaluasi Diri terhadap kinerja sekolah/madrasah, yang meliputi kegiatan: Evaluasi proses pembelajaran secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, pada akhir semester akademik; Evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah.
 - c. Evaluasi dan Pengembangan KTSP yang dilaksanakan secara komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir.
 - d. Evaluasi Pendaangunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan pada setiap akhir semester dengan mengacu pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - e. Mendapatkan Akreditasi Sekolah/Madrasah, seperti dari BAN (Badan Akreditasi Nasional) dan ISO
4. Kepemimpinan Sekolah/ Madrasah, yang memiliki kemampuan memimpin yaitu memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.
5. Sistem Informasi Manajemen, meliputi kegiatan seperti:
- a. Mengembangkan sistem informasi hasil evaluasi kinerja sekolah dalam mewujudkan target mutu
 - b. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan yang diintegrasikan pada tenaga administrasi sekolah, SIM kesiswaan, ketenagaan, keuangan, administrasi umum, administrasi akademik.
 - c. Mengembangkan sistem informasi pembelajaran meliputi informasi perencanaan belajar, materi belajar, penjaminan mutu pembelajaran, instrumen evaluasi dan hasil evaluasi belajar

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah/ Manajemen Berbasis Madrasah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebuah konsep pendekatan yang dipilih pemerintah di era desentralisasi saat ini sebagai alternatif dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan persekolahan, yaitu memberikan otonomi yang luas di tingkat sekolah serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kerangka

kebijakan pendidikan nasional.¹⁵ Konsep MBS ini telah lebih dahulu diterapkan di negara-negara lain dengan sebutan yang beragam antara lain *self-Managing School*, *Collaborative school management*, *school based management* atau *community based school management*.¹⁶ Di Indonesia-pun sebutannya juga beragam antara lain: Manajemen Berbasis Sekolah/ Madrasah (MBS/MBM), Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah¹⁷, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS)¹⁸, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)¹⁹

Danim²⁰ mendefinisikan MBS adalah proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu, dengan kata lain Danim menyebut dengan istilah desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan pada tingkat sekolah. MBS pada intinya adalah upaya terus menerus untuk memperbaiki kinerja sekolah dengan memposisikan sekolah sebagai institusi yang relatif otonom. Menurut Danim²¹ konsep perbaikan kinerja sekolah secara terus menerus ini relevan dengan filosofi *kaizen* yang ada dalam *konsep Total Quality Management (TQM)*, bahwa selalu tersedia ruang gerak, waktu dan tenaga untuk melakukan perbaikan dalam istilah lain dikenal dengan nama *continuous improvement* (perbaikan terus menerus). Sekolah yang menganut konsep *kaizen* akan mengenal istilah standar, dimana ketika standar yang dikehendaki telah tercapai, maka akan ditetapkan standar baru atau awal baru untuk menentukan capaian standar lain yang dikehendaki.

Menurut Tony Barnes yang dikutip oleh Danim, terdapat 10 prinsip dalam *kaizen*, yaitu:

1. Berfokus pada pelanggan
2. Melakukan peningkatan terus menerus
3. Mengakui masalah secara terbuka

¹⁵ Irwan Nasution, Manajemen Berbasis Sekolah (Tradisi Baru Perubahan Manajemen Pendidikan dari Perilaku Birokratis Hirarkhis menuju Demokratis, (*Visi Wacana Vol. XVI No. 19 Mei-Agustus 2005:44-64*), 46

¹⁶ Prim Masrokan Muntohar, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 123

¹⁷ Prim Masrokan Muntohar, *Manajemen...*, 123.

¹⁸ Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Management: Analisi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 150.

¹⁹ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 2, 2007)

²⁰ Sudarwan Danim, *Visi...*, 34

²¹ Sudarwan Danim, *Visi...*, 19

4. Mempromosikan keterbukaan
5. Menciptakan tim kerja
6. Memanajemani tim proyek melalui tim fungsional silang
7. Memelihara proses hubungan yang benar
8. Mengembangkan disiplin pribadi
9. Memberikan informasi pada semua karyawan
10. Memberikan wewenang kepada setiap karyawan.

MBS merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi indikator keberhasilannya terletak pada peningkatan mutu. Itulah sebabnya Danim menyebutnya dengan istilah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). Skema berfikir dari kebijakan ini digambarkan Danim sebagaimana gambar 1.

Menurut Danim²², saat ini di lingkungan Depdiknas dan Dinas Diknas, terminologi yang populer digunakan adalah MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah) yang pada intinya adalah otonomi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. titik tekan MPMBS adalah perbaikan mutu masukan, proses, keluaran pendidikan, serta sepanjang memungkinkan juga menggamit layanan purnalulus. Jadi, yang menjadi konsep dasar MPMBS adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif. Terdapat empat prinsip MBS menurut Rivai yaitu:²³

1. Prinsip equifinalitas, yang didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara untuk mencapai tujuan. Manajemen sekolah menekankan adanya fleksibilitas dan pengelolaan masing-masing.
2. Prinsip desentralisasi, sekolah diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan secara efektif.
3. Prinsip sistem pengelolaan mandiri (*self managing system*), MBS tidak menyangkal perlunya mencapai tujuan berdasar kebijakan dari atas, akan tetapi menurut MBS ada berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Prinsip inisiatif manusia, MBS bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai dengan anggota sekolah sehingga mereka dapat berpartisipasi secara luas, berinisiatif serta mengembangkan potensi mereka.

²² Sudarwan Danim, *Visi...*, 28.

²³ Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education...*, 151.

Dengan demikian, dalam MBS madrasah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola lembaganya. Kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada madrasah pada gilirannya akan menuntut setiap madrasah untuk mereformasi dirinya. Setiap madrasah harus beralih dari budaya dan manajemen yang bersifat “menunggu dan bertindak sesuai kebijakan atas” yang bersifat konvensional kepada sebuah budaya dan manajemen baru yang menempatkan hasil telaah diri sebagai titik awal usaha pengembangan, kemandirian dan akuntabilitas sebagai instrumen utama dalam proses pengembangan dirinya, dan peningkatan mutu sebagai muara dan tujuan utama dari setiap usaha pengembangan itu. Selain itu ada satu konsep penting yaitu bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan yang terwadahi dalam komite sekolah. Untuk maksud MBS inilah kemudian pemerintah memberikan standar-standar yang menjadi acuan dalam peningkatan mutu, yaitu SNP, dan untuk masalah pengelolaan pendidikan selanjutnya di atur secara terperinci dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

Kriteria Keberhasilan Manajemen Berbasis Madrasah

Kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria keberhasilan MBS merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar penilaian atau penetapan tingkatan ketercapaian suatu program MBS. Menurut Nurkholis terdapat sembilan kriteria ukuran keberhasilan implementasi MBS, yaitu:²⁴

1. Jumlah siswa yang mendapat pelayanan semakin meningkat
2. Kualitas layanan (*service quality*) pendidikan meningkat
3. Tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik
4. Relevansi penyelenggaraan pendidikan semakin baik
5. Adanya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan
6. Meningkatnya keterlibatan *stakeholders*
7. Kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik
8. Demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan

Jadi dapat disimpulkan secara umum bahwa sekolah yang berhasil menerapkan MBS adalah yang kualitas pelayanan di segala bidang, produktifitas serta penyelenggaran pendidikan, serta keterlibatan semua pihak meningkat yang berujung pada lingkungan dan iklim yang produktif.

²⁴ Nukholis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia, 2003), 145.

Karakteristik Manajemen Berbasis Madrasah

Berdasarkan gerakan reformasi pendidikan, menurut Bailey, yang dikutip Danim terdapat beberapa karakteristik MBS, seperti berikut ini:²⁵

1. Adanya keragaman dalam pola penggajian guru, pendekatan yang digunakan adalah prestasi (*merit system*), yaitu pengalokasian gaji berdasarkan prestasi.
2. Otonomi manajemen sekolah. Sekolah/Madrasah menjadi sentral manajemen pada tingkat strategis dan operasional.
3. Pemberdayaan guru secara optimal, guru harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar turut membangun mutu dan citra baik di masyarakat.
4. Pengelolaan sekolah secara partisipatif, kepala sekolah bekerja sama dengan seluruh anggota sekolah sehingga terjadi transparansi pengelolaan sekolah.
5. Sistem yang didesentralisasikan.
6. Sekolah dengan berbagai program pilihan.
7. Hubungan kemitraan antara dunia bisnis dan dunia pendidikan, hubungan ini tidak hanya masalah pendanaan, melainkan juga kegiatan praktek kerja dan program pembinaan serta pengembangan lainnya.
8. Akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh mandiri, kewenangan yang luas bagi sekolah memberi ruang untuk dibuat sebuah keputusan yang inovatif demi peningkatan mutu sekolah.
9. Pemasaran sekolah secara kompetitif. Apabila sekolah telah membangun citra mutu yang unggul, maka telah dapat memenangkan persaingan.

Karakteristik MBS/MBM dapat diketahui dari bagaimana sekolah/ madrasah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi, proses pembelajaran, pengelolaan SDM, serta pengelolaan sumberdaya dan administrasi.

Konsep Standar Mutu Manajemen Madrasah dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa manajemen mutu merupakan sebuah upaya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan menuju ke arah yang lebih baik berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Kata lebih baik ini seringkali dibahasakan dengan efektif dan efisien. Meski

²⁵ Sudarwan Danim, *Visi..*, 29.

berbeda dengan lembaga bisnis, namun pentingnya mengimplementasikan ilmu-ilmu manajemen termasuk manajemen strategik, ke dalam pengelolaan lembaga pendidikan tidak bisa terelakkan. Terutama lagi dengan lembaga pendidikan Islam yang notabene, mengajak umatnya untuk melakukan pekerjaan dengan *itqan* (tepat, jelas dan terarah), sebagaimana dalam hadits disebutkan:

إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه

Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, tuntas). (HR. Thabrani).²⁶

Dalam hadist tersebut terdapat kata *itqan*, yang memiliki makna memiliki tujuan yang jelas dan dicapai dengan cara yang tepat dan terarah. Tentu ini sama dengan apa yang dimaksud dengan efektif dan efisien dimana segala sesuatu itu harus dilaksanakan dengan benar sesuai tujuan (efektif) dan dengan cara yang benar agar tidak terjadi pemborosan (efisien). Sebagaimana pencapaian tujuan yang terbaik diharapkan dalam konsep efektivitas, dalam Islam, mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh berarti melaksanakan apa yang disukai Allah. Sebagaimana firman Allah Qs. Al-An'am/6: 135²⁷

قُلْ يَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

(Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sejauh kesanggupan kalian karena sesungguhnya akupun berbuat (seperti itu pula). Kelak kalian akan melihat, siapa yang akan memperoleh hasil yang baik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berbahagia)

Dalam ayat tersebut, jelas bahwa kita diperintah agar melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh agar mencapai hasil yang maksimum. Dengan usaha yang sungguh-sungguh pencapaian

²⁶ Didin Hafidhuddin dan Henry Tanjung, *Shariah Principle on Management in Practice*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), . 1

²⁷ A. Hassan. *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*. (Jakarta: Penerbit Universitas Al Azhar Indonesia, 2010), 237

tujuan yang kita laksanakan akan mencapai hasil maksimal, atau hasil terbaik. Di akhir ayat, disebutkan bahwa orang yang zalim tidak akan berbahagia. Zalim dapat dimaknai sebagai menganiaya diri sendiri dengan mengerjakan apa-apa yang tidak diridhai Allah²⁸. Mengerjakan sesuatu dengan seadanya, malas-malasan berarti melaksanakan sesuatu yang tidak diridhai Allah, dimana kelak akan kita dapatkan bahwa hasil yang kita inginkan tidak akan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Dari ayat ini beserta dukungan dari hadits sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kita diperintah untuk selalu mengerjakan segala sesuatu secara efektif yaitu tepat sasaran agar mencapai hasil yang maksimum. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa manajemen itu sendiri merupakan bagian dari syariah, meskipun kata manajemen terkesan lebih modern. Walaupun al-Qur'an tidak menyebutkan kata manajemen, namun bagian-bagian dari konsep manajemen dapat dibidang sesuai dengan syariah.

Meskipun lembaga pendidikan bukan merupakan lembaga bisnis yang mencari tujuan profit, namun sebuah lembaga pendidikan pada kenyataannya juga mengalami proses produksi yang terdiri atas input, proses, output, dimana dari input yang dimasukkan akan mengalami proses yang nantinya diharapkan menghasilkan output dengan kualitas yang baik. Kualitas atau sering dikenal dengan istilah mutu, yang diharapkan dalam lembaga pendidikan adalah lulusan yang berprestasi. Agar sebuah sekolah bisa menghasilkan lulusan yang terbaik, tentunya murid harus mengalami proses yang baik pula, dalam artian dalam proses belajar mengajar, mereka mendapatkan kualitas pengajar dan pengajaran yang baik pula, didukung dengan kondisi dan lingkungan sekolah yang memadai. Proses-proses kegiatan tersebut akan berjalan baik jika dilaksanakan dengan manajemen yang baik pula

R Terry yang dikutip oleh Amirullah dan Haris Budiyono²⁹ mendefinisikan, *management a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objective by the use human being and other resources* (manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : Perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan,

²⁸ *Ibid*, xxxv

²⁹ Amirullah dan Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 24

dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber daya lainnya.

Proses-proses manajemen tersebut, meskipun tidak dalam bahasa yang sama, pada dasarnya telah banyak disinggung dalam al-Qur'an, sebagaimana berikut ini:

1. *Planning*/ Perencanaan

Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk melakukan perencanaan atau persiapan dalam melaksanakan sesuatu, sebagaimana firman Allah Qs. Ash Shad:27³⁰

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Dan kami tidak menciptakan langit, bumi dan apa yang ada antara keduanya itu sia-sia. Demikianlah sangkaan orang-orang kafir, Maka kecelakaanlah (dari api neraka adalah) bagi orang-orang kafir.

Di ayat tersebut, dikatakan bahwa Tuhan tidaklah mencipta segala sesuatu dengan bathil (sia-sia atau tanpa hikmah). Bathil berarti sesuatu yang dilakukan tanpa perencanaan dan tanpa maksud atau dengan kata lain sia-sia. Tuhan telah merencanakan semua. Perencanaan adalah bagian dari Sunnatullah, dimana jika segala sesuatu direncanakan dengan baik maka hasilnya juga akan baik dan sebaliknya. Dalam ayat lain Allah berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Persiapkanlah untuk (melawan) mereka (musuh-musuh kalian) bekal kekuatan apapun yang kalian sanggupi dan kuda-kuda yang bisa kalian gunakan untuk membuat gentar musuh Allah dan musuh kalian serta (musuh) yang lain yang tidak kalian ketahui (tetapi) Allah mengetahui mereka. Apapun yang kalian

³⁰ A. Hassan. *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*, 770

belanjakan di jalan Allah akan disemprunakan (balasannya) bagi kalian dan kalian tidak akan dianiaya. (al-anfal: 60)³¹.

Dalam ayat tersebut, Allah menyeru kepada kita untuk bersiap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang kita hadapi di depan, sehingga kita harus bersiap. Bersiap bukan berarti diam menunggu tanpa melakukan apapun. Bersiap adalah membuat rencana-rencana agar tujuan kita tercapai dan membuat rencana terkait kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.

2. *Organizing*/Pengorganisasian

Setelah direncanakan, maka perlu dilakukan koordinasi agar tugas dan tanggung jawab bisa dibagi-bagi. Koordinasi dimaksudkan agar semua bisa terkendali. Agar tujuan terlaksana dengan baik, maka koordinasi tersebut harus kokoh dan rapi. Semua bekerja sesuai dengan bidang, keahlian dan tugasnya masing-masing. Dalam Qs. Ash Shaff: 4 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَيْنَ مَرَّصُونَ ﴿٤﴾

Sesungguhnya Allah menyukai mereka yang berperang di jalan-Nya dengan berbaris, seolah-olah mereka suatu bangunan yang tersusun.³²

Ayat ini (61:4) menunjukkan bahwa Allah lebih menyukai orang yang berjihad di jalanNya dalam dalam sebuah organisasi yang teratur, dimana didalamnya terdiri atas banyak orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diridhai Allah. Hal ini tentu bisa sangat kita pahami jika kita analogikan bagaimana sebuah sapu lidi yang terikat itu akan lebih bisa membawa banyak kotoran dari pada lidi yang berdiri sendiri, tentu tidak akan bisa menghapus kotoran secara berarti. Atau jika kita merujuk langsung pada analogi dari ayat tersebut, dimana ayat tersebut menganalogikan dengan sebuah bangunan yang kokoh, maka dapat kita katakan bahwa sebuah bangunan dapat kehujanan jika tidak ada atapnya, akan roboh jika tidak ada tiangnya, akan mudah dimasuki orang jika tidak ada pintunya dsb.

³¹ A. Hassan. *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*. 297

³² A. Hassan. *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*. 959

Organisasi merupakan sebuah lembaga atau wadah fungsional, sudah pasti membutuhkan pengelolaan dan pengaturan yang baik, rapi, dan teratur, yang saat ini dikenal dengan nama manajemen. Manajemen organisasi yang baik, akan menghasilkan sebuah organisasi yang baik pula. Ali bin Abi Thalib mengatakan:

الحق بلا نظام يغلبه الباطل بنظام

*Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik.*³³

Dalam hal ini jelas bahwa Ali mendorong kaum muslimin agar jika melakukan sesuatu yang benar, hendaknya ditata dengan rapi agar tidak terkalahkan oleh kebatilan yang disusun dengan rapi.

3. Actuating/Leading/Kepemimpinan

Sudah menjadi sunnatullah bahwa beberapa dari kita menjadi pemimpin sebagian lain. Sebagai pendukung dari ayat mengenai kecintaan Allah jika sesuatu yang baik itu dilaksanakan dalam barisan yang kokoh, dalam artian harus terkoordinasi dengan baik, maka barisan tersebut membutuhkan pemimpin yang akan mendorong dan menggerakkan mereka ke arah tujuan baik yang diinginkan. Dalam firmanNya. Qs. Al-An'am (6):165³⁴

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ

وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dan dia lah yang menjadikan kalian khalifah (di)bumi dan dan mengangkat derajat sebagian kalian atas sebagian yang lainnya, untuk menguji kalian tentang apa yang Dia berikan kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, tetapi sesungguhnya Dia juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

³³ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Penerbit Erlangga, 2007), . 30

³⁴ A. Hassan. *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*, 245

Sebagian kita memang terpilih untuk menjadi pemimpin, dan bertanggung jawab dalam memberi pengarahan kepada bawahannya. Dalam ayat lain Az Zukhruf: 32 Allah berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*Apakah mereka yang (yang berhak) membagi karunia Tuhanmu? Kami Telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan rendah (ini), dan Kami telah meninggikan sebagian mereka daripada sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan karunia Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.*³⁵

4. Controlling/Pengawasan dan Evaluasi

Fungsi pengelolaan mutu selanjutnya adalah dimensi pengawasan dan Dalam Qs. Al Mujadilah: 7, Allah berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا
يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا
كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنزِّلُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٧﴾

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi? Tak satupun pembicaraan rahasia di antara tiga orang, melainkan Dia yang keempatnya. Tidak ada (pembicaraan rahasia di antara) lima orang, melainkan Dia yang

³⁵ A. Hassan. *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*, 833

keenamnya. Tidak ada (pula pembicaraan rahasia di antara jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada, lalu Dia akan memberitahu mereka pada hari kiamat tentang apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁶

Allah mengawasi setiap ciptaanNya. Pengawasan ini dilakukan melalui para malaikatnya yang senantiasa mencatat segala amal baik dan buruk manusia. Namun dalam pengawasan ini tidak berarti Allah hanya mengawasi saja, akan tetapi Allah juga memberi petunjuk jalan yang benar.

Dalam perspektif madrasah, agar tujuan pendidikan di madrasah dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen pendidikan memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimana pun madrasah merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Madrasah tanpa didukung proses manajemen yang baik, boleh jadi hanya akan menghasilkan kesemrawutan lajunya organisasi, yang pada gilirannya tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai secara semestinya. Dengan demikian, setiap kegiatan pendidikan di madrasah harus memiliki perencanaan yang jelas dan realitis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengerahan dan pemotivasian seluruh personil madrasah untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, secara berkelanjutan.

³⁶ A. Hassan. *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*, 944

Kesimpulan

Standar mutu berdasar Standar Nasional Pendidikan (Quality in fact) merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. MBS adalah proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu . MBS merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi indikator keberhasilannya terletak pada peningkatan mutu. Berikut landasan melakukan pengeloa;aan yang berbasis peningkatan mutu (MBS/ MBM) dalam Islam, yaitu: melakukan pekerjaan dengan itqan (tepat, jelas dan terarah); mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh (Al-An'am/6: 135); konsep manajemen (Ash Shad:27, Ash Shaff: 4, Al-An'am (6):165, Az Zukhruuf: 32, Al Mujadilah: 7).

Daftar Pustaka

- Ainurrafiq, Dawam dan Ta'arifin Ahmad. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren* (Jakarta: Listafarika Putra, 2008)
- Danim, Sudarwan,. *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 2, 2007)
- Evans, Ian G. *Marketing For School* (London: Cassel, 1995)
- Hafidhuddin, Didin dan Henry Tanjung. *Shariah Principle on Management in Practice*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)
- Hassan, A. *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*. (Jakarta: Penerbit Universitas Al Azhar Indonesia, 2010)
- <http://bnsp-indonesia.org> diakses tanggal 26 Mei 2020.
- Menteri Pendidikan Nasional, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*
- Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Penerbit Erlangga, 2007)
- Muntohar, Prim Masrokan. *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)
- Nasution, Irwan. *Manajemen Berbasis Sekolah (Tradisi Baru Perubahan Manajemen Pendidikan dari Perilaku Birokratis Hirarkhis menuju Demokratis*, (*Visi Wacana Vol. XVI No. 19 Mei-Agustus 2005:44-64*)
- Nukholis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia, 2003)
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Pasal 1 (9)), 2

Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (pasal 51 ayat 1 dan 2)

Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. *Education Management: Analisis Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

Rohiat. *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, Cet.2, 2008)

Sallis, Edward. *Total Quality Managemen in Education*, (Cet. XVI; Jogjakarta: IrciSod, 2012)

Syaifudin, Mohamad. *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, 2007)

Tampubolon, Daulat P. *Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-2* (Cet I; Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2001)